

IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC EDUCATION THROUGH LEARNING CIVIC EDUCATION TO ESTABLISH RESPONSIBLE CITIZEN

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PEMBELAJARAN PKn UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB

Siti Rahmi Anjani¹, Dasim Budimansyah², Abdul Azis Wahab³

¹Mahasiswa Prodi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

²Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

³Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

E-mail : sitirahmianjani@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed by the occurrence of deterioration of the learning process that led to the Civics students are less concentrated in the learning process. The results of the study of democratic education through Civic Education learning to form responsible citizens in Junior High School 2 Soreang generate active student learning, creative and innovative to make the grade as a laboratory of democracy, the educational content of democracy is equal rights and duties in school. The emergence of active students in school attitudes make the students are always active in school activities and are taught to always be responsible for the act of doing as a form of education shape the success from the democratic process of responsible.

Keywords: Democratic Education, Rights and Duties, Learning Civics, Responsibility Attitudes of Students

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kemerosotan proses pembelajaran PKn yang menyebabkan para siswa kurang berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab di SMP Negeri 2 Soreang menghasilkan proses pembelajaran siswa yang aktif, kreatif dan inovatif dengan menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, dengan konten pendidikan demokrasi adalah persamaan hak dan kewajiban di sekolah. Munculnya sikap keaktifan siswa di sekolah membuat siswa selalu aktif dalam kegiatan sekolah dan dididik untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sebagai wujud bentuk keberhasilan dari proses pendidikan demokrasi yang bertanggung jawab.

Kata Kunci : Pendidikan Demokrasi, Hak dan Kewajiban, Pembelajaran PKn, Sikap Tanggung Jawab Siswa

Salah satu tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendidikan merupakan salah satu yang menjadi jalan keluar. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menentukan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Kualitas itulah yang akan

menentukan apakah bangsa Indonesia dapat mewujudkan tujuannya. Manusia yang berkualitas baik diperlukan untuk mengelola segenap potensi bangsa dan melestarikannya.

Paradigma demokrasi yaitu “*education about, through, and for democracy*” yang mempunyai konsep Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi yaitu suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai,

konsep dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang. (CIVITAS Internasional, 1996, CICED: 1999, APCEC: 2000, Winatraputra: 2001, 2012 :70).

Paradigma demokrasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi bukan hanya sebagai pengetahuan siswa tetapi implementasi dari pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi yang seharusnya dilakukan. Menurut Gandal dan Finn : 1992 (dalam Winatraputra, 2012: 72) pendidikan demokrasi sering dianggap sebagai “...taken for granted or ignore”, yaitu demokrasi akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Untuk mengantisipasi pernyataan tersebut maka diharuskan adanya pembelajaran demokrasi yang nyata di persekolahan. Secara instrumental pendidikan demokrasi di persekolahan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3).

Peraturan perundang-undangan tersebut menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1).

Pembelajaran pendidikan demokrasi menurut Winatraputra dapat dibagi menjadi dua yaitu *school based democracy education* yakni pendidikan demokrasi dalam konteks formal atau sekolah dan *society based democracy education* yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Kemudian yang lebih ditekankan pada penelitian ini adalah pendidikan demokrasi yang dibelajarkan di sekolah atau *school based democracy education* melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran PKn sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan sebagai wahana

pendidikan demokrasi Pancasila menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang sangat penting karena mempunyai tujuan *good and smart citizen*, maksudnya adalah warga negara Indonesia harus baik dan cerdas secara ajeg memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera (Winatraputra :2012).

Pendidikan demokrasi yang dibelajarkan di sekolah melalui mata pelajaran PKn dituntut dapat memberikan pemahaman dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran di persekolahan, seperti yang diungkapkan oleh Somantri (dalam Pidato Penganugrahan Doktor Honoris Causa) 2011 bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan di abad ke 21 ini harus menjawab tuntutan sebagai kebebasan dan berdemokrasi, liberalisasi dalam kehidupan, ke-mandirian dalam kelompok, ber-kembangnya IPTEK dan dorongan ingin terus maju.

Spirit dari tuntutan itu pada intinya adalah sebagai perubahan dimana dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan pendidikan demokrasi yang di dalamnya terdapat prinsip demokrasi dapat diterapkan dengan baik di persekolahan. Hal ini dilakukan dengan mengubah gaya mendidik Kewarganegaraan ke arah abad 21 yang menfokuskan pada kajian unsur-unsur, isu-isu dan konteks yang berbeda secara berkelanjutan.

Kebijakan PKn di masa depan harus berlandaskan pada suatu konsep kewarganegaraan multidimensional sebagai konteks yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan di abad 21 (Cogan,1998 dalam Wahab dan Sapriya: 2011). Maka pembelajaran PKn tidak hanya mencakup pengetahuan saja tetapi lebih menekankan pada keaktifan siswa yang tidak terlepas dari budaya demokrasi yang ada di Indonesia yaitu budaya demokrasi Pancasila.

Adanya pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn diharapkan dapat menghasilkan siswa yang demokratis karena bahan-bahan ajar, metode mengajar yang digunakan adalah bahan metode mengajar yang demokratis serta berlandaskan Pancasila yang mengacu kepada lima sila Pancasila yaitu :

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan jelas bahwa pendidikan demokrasi harus ditanamkan sedini mungkin supaya siswa dapat mengetahui dan memahami arti pentingnya demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang Kabupaten Bandung, karena sesuai dengan hasil observasi di lapangan SMP Negeri 2 Soreang masih terlihat kurang dalam implementasi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran PKn khususnya dan sekolah pada umumnya, padahal terdapat fasilitas yang memadai.

Implementasi pendidikan demokrasi yang diterapkan di SMP Negeri 2 Soreang ini sebagai wujud dari pengimplementasian pendidikan demokrasi yang diterapkan di sekolah. Pendidikan demokrasi yang dibelajarkan kepada siswa untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi secara global sebenarnya pembelajaran yang seharusnya dilakukan di setiap persekolahan sehingga mutu dari sekolah tersebut menjadi baik. Siswa dapat menggunakan haknya yaitu kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

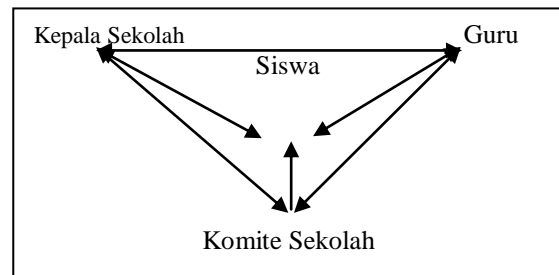
METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan tipe penelitian eksploratoris, metode studi kasus dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan *how* atau *why*.

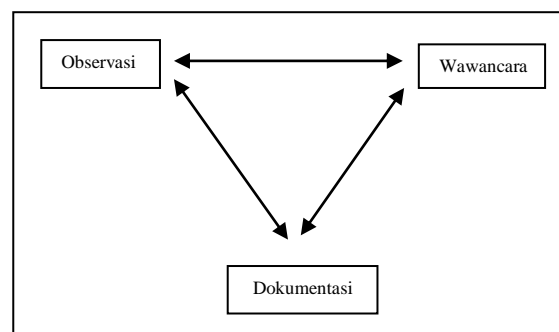
Sesuai dengan penelitian, maka uji keabsahan data atau validitas dalam penelitian kualitatif meliputi triangulasi, memperpanjang masa observasi, *member check* dan mendeskripsikan.

1. Triangulasi (*Triangulate*)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang justru dapat merangsang pemikiran secara mendalam.



Gambar 1. Triangulasi dengan Sumber Data



Gambar 2. Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data

Sumber : Sugiono (2008:374)

2. Memperpanjang Masa Observasi

Memperpanjang masa observasi untuk memperoleh data yang valid dalam sumber data dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan melakukan penelitian dalam konteks yang wajar dan waktu yang tepat.

3. Menerapkan *Member Checking*.

Member checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik kehadiran partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan atau deskripsi atau tema tersebut sudah akurat.

4. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*Rich and thick description*) tentang hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengemasan Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan bahwa persiapan pengemasan pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang ini diawali dengan pembelajaran mengenai demokrasi, siswa-siswi diberi pembelajaran dan pemahaman mengenai pendidikan demokrasi seperti adanya materi demokrasi, bagaimana melakukan demokrasi yang baik dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Peneliti bersama guru-guru PKn di SMP Negeri 2 Soreang bersama-sama mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran

Tabel 2. Pengemasan Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang

Temuan Penelitian
Kegiatan pembelajaran PKn di kelas :
1. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah bervariasi.
2. Guru dijadikan sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar.
3. Adanya diskusi di kelas.
4. Adanya hak kebebasan mengemukakan dan menerima pendapat.
5. Terjalin kerjasama antara guru dengan siswa.
6. Terselenggaranya kelas sebagai laboratorium demokrasi
Pembinaan demokrasi melalui pembelajaran PKn :
1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi pada siswa.
2. Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang diterapkan untuk menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.
3. Membina rasa kebersamaan di kelas.
4. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan data tabel di atas yang diperoleh dari data hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi yang dilakukan di

secara bervariasi untuk memberikan stimulus kepada siswa-siswi supaya memberikan kesan senang dalam proses pembelajaran PKn. selama dua bulan peneliti melakukan penelitian ternyata membuahkan hasil, siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang setidaknya dengan pemberian materi demokrasi yang menggunakan metode oleh guru PKn ternyata dapat mengubah pola pikir siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang.

Dapat dipahami bahwa inti dari pengemasan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn adalah bagaimana guru sebagai tonggak dalam proses pembelajaran dapat memberikan pengajaran dengan baik sehingga siswa bersikap aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi pada saat mata pelajaran PKn.

lapangan dapat dipahami bahwa pengemasan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang sepenuhnya dilakukan, ini terbukti dengan proses pembelajaran di kelas sudah menggunakan ceramah bervariasi dengan berbagai macam metode. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan guru atau teman sebayanya sehingga proses pembelajaran berjalan dengan aktif .

Pembinaan demokrasi yang dilakukan atas kerjasama antara guru PKn yang didukung oleh pihak sekolah. Guru PKn sedikit demi sedikit mengubah pola cara proses belajar pembelajaran menjadi pola pembelajaran yang aktif dan kreatif. Selama dua bulan ini siswa dibiasakan pada mata pelajaran PKn khususnya untuk selalu menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi sebagai salah satu penerapan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn, sehingga diharapkan kedepannya guru lebih aktif dalam mengemas materi PKn dengan menggunakan kurikulum 2013, sehingga siswa tidak akan merasa jenuh dalam proses pembelajaran.

Pembinaan demokrasi ini sengaja dilakukan untuk menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang siswa-siswi yang kritis inovatif dan kreatif sehingga nilai-nilai demokrasi yang selama ini tenggelam dapat muncul kembali dan siswa memahami tentang demokrasi.

Pembiasaan Pendidikan Demokrasi dan Sikap Tanggung Jawab Siswa di SMP Negeri 2 Soreang

Pada awalnya pembiasaan pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang menghadapi kesulitan karena kurangnya pemahaman tentang proses demokrasi yang seharusnya berlangsung di persekolahan, faktor-faktor yang menjadi penunjang adanya pembiasaan demokrasi adalah sikap keterbukaan guru dan siswa sehingga dapat dengan mudah memberikan pengajaran tentang demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang. Selain itu, kotak saran dan kritik dapat juga dijadikan sebagai sarana dari penerapan sistem demokrasi di sekolah.

Demokrasi yang diterapkan di SMP Negeri 2 Soreang berawal ketika sekolah melihat siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang yang sebagian besar berada di perkampungan dengan memiliki budaya malu sehingga tidak terbiasa dengan pergaulan orang banyak. Dalam hal ini, sekolah secara inisiatif ingin mengubah pola tingkah laku siswa supaya dapat berinteraksi dengan baik dan keaktifan siswa di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Sebagai langkah awal siswa-siswi diberikan pengajaran tentang pentingnya demokrasi melalui pembelajaran PKn yang mengharuskan kelas sebagai laboratorium demokrasi dan aplikasi dari pembinaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah dengan membiasakan siswa untuk membangun budaya demokrasi seperti pembiasaan mendengarkan pendapat teman sebaya dan menerima pendapat dari teman sebaya sehingga terjalin keakraban pada diri siswa.

Pembiasaan pendidikan demokrasi yang diterapkan di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara pembagian tugas kegiatan sehari-hari siswa-siswi di rumah. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan membagi tugas piket bersih-bersih rumah, sehingga bentuk kerjasama yang dilakukan oleh keluarga siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang tersebut menerapkan sistem nilai-nilai demokrasi di rumah.

Pembiasaan pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang terlihat pada proses pembelajaran yang bersikap demokratis, siswa-siswi oleh guru PKn diajak untuk aktif di kelas dengan cara diskusi, mengemukakan pendapat dan menerima saran sehingga kelas tidak sepi

tetapi ramai oleh siswa-siswi yang aktif dalam proses belajar mengajar.

Anggota OSIS sebenarnya sudah terbiasa dengan pembiasaan pendidikan demokrasi yang diterapkan itu terbukti dengan pemilihan ketua OSIS secara langsung, dalam kegiatan keorganisasian biasanya koordinasi antar tim atau *time work* selalu harus dilakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan yang baik, menerima kritik dan saran menjadi hal yang sangat penting dalam organisasi untuk itu Pembina ekstrakurikuler selalu mengajarkan tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi yang diajarkan pada organisasi.

Pembiasaan pendidikan demokrasi dan sikap tanggung jawab siswa di SMP Negeri 2 Soreang dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama antara pihak sekolah, guru serta siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang dengan begitu pembiasaan demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadikan sekolah sebagai sekolah demokrasi.

Tabel 3. Pembiasaan Pendidikan Demokrasi dan Sikap Tanggung jawab Siswa SMP Negeri 2 Soreang

No	Temuan Penelitian
1	Proses belajar mengajar di Kelas : Pembiasaan dilakukan dalam kelas pada mata pelajaran PKn sebagai laboratorium demokrasi dengan selalu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan
2	Pembiasaan pendidikan demokrasi dan sikap tanggung jawab siswa yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai berikut : a. Ikutserta dalam kegiatan di luar sekolah seperti ekstrakurikuler. b. Menerapkan sikap disiplin kepada siswa. c. Menyiapkan kotak kritik dan saran untuk siswa d. Selalu melakukan pemilihan secara langsung dalam memilih ketua OSIS e. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati.
3	Pembiasaan sikap tanggung jawab siswa di sekolah : a. Siswa diberikan pemahaman

	<p>terhadap hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran, hak siswa adalah mendapatkan pengajaran sementara kewajiban siswa adalah belajar dan bertanggung jawab mengerjakan tugas sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>b. Siswa dididik untuk selalu bertanggung jawab apabila diberi amanah atau kepercayaan.</p>
4	<p>Pembiasaan di lingkungan keluarga: Di lingkungan keluarga pendidikan demokrasi dapat dilakukan dengan pembagian tugas di antara setiap anak dan harus bertanggung jawab pada setiap pekerjaan yang sudah diamanatkan.</p>

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan data tabel di atas yang diperoleh dari data observasi, dan wawancara yang dilakukan di lapangan dapat dipahami bahwa pembiasaan pendidikan demokrasi dan sikap tanggung jawab siswa di SMP Negeri 2 Soreang ini dapat diawali dengan pembiasaan kelas yang dijadikan sebagai laboratorium demokrasi, siswa diajak untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan proses pembelajaran, menanamkan sikap demokrasi kepada siswa di kelas dapat dilakukan dengan melakukan diskusi kelas, mendengarkan pendapat dari teman, menerima saran dari teman dan selalu aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan sebagai bentuk tanggung jawab siswa-siswi SMP negeri 2 Soreang adalah selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik.

Pembiasaan pendidikan demokrasi dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan memberikan ruang sebebaskan-bebasnya kepada siswa untuk selalu mengemukakan pemikirannya baik pada saat akan menyelenggarakan kegiatan atau pada saat proses pembelajaran. Selain itu, contoh nyata pendidikan demokrasi yang ada di lingkungan sekolah adalah dengan adanya pemilihan OSIS secara langsung yang diawali dengan masa kampanye atau orasi sampai kepada pemilihan secara langsung oleh seluruh siswa. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler biasanya lebih peka terhadap pembelajaran demokrasi di sekolah dan lebih bertanggung jawab apabila mengerjakan sesuatu.

Rasa tanggung jawab siswa diperlihatkan dengan selalu mengerjakan piket kebersihan

kelas sehingga tidak jarang peneliti merasa kagum dengan kelas yang bersih dan toilet yang bersih pula sehingga tidak mengherankan apabila sekolah SMP Negeri 2 Soreang mendapat penghargaan Adipura dari pemerintah Kabupaten Bandung sebagai percontohan sekolah terbersih se-Kabupaten Bandung.

Pembinaan pendidikan demokrasi dan tanggung jawab dapat juga dilakukan di lingkungan rumah dengan pembagian tugas kegiatan rumah seperti mencuci, menyetrika, mengepel sampai dengan memasak. Sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa itu adalah penerapan nilai-nilai demokrasi yang ada di lingkungan keluarga, namun mereka sudah terbiasa dan melaksanakan tugas rumah tersebut sebagai rutinitas dan bertanggung jawab kepada setiap pekerjaannya.

Metode dalam Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang

Seorang guru yang profesional, seharusnya dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Seorang guru dapat menyajikan berbagai macam media yang dapat menunjang proses pembelajaran serta dapat membantu proses pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.

Metode dalam proses pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn untuk mewujudkan sikap tanggung jawab siswa di SMP Negeri 2 Soreang ini adalah hasil kesepakatan antara guru PKn di SMP Negeri 2 Soreang yang harus dibiasakan pada saat pembelajaran PKn

Fasilitas di SMP Negeri 2 Soreang terbilang lengkap namun kemauan dan kemampuan setiap guru kurang dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Di SMP Negeri 2 Soreang sudah memiliki beberapa *in focus* dan layar yang sebenarnya dapat digunakan untuk presentasi.

Peneliti bersama guru PKn mencoba untuk membuat metode pembelajaran diskusi dengan menggunakan infokus dan media yang lainnya dan hasilnya dapat terlihat setelah dua kali menggunakan media pembelajaran pada saat materi pembelajaran PKn.

Metode yang digunakan dalam pembelajaran PKn adalah *Snowball Trowing* dimana melemparkan bola salju. Model pembelajaran *Snowball Trowing* ini bertujuan untuk menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan yang imajinatif membentuk dan melempar bola.

Pembiasaan demokrasi melahirkan sikap tanggung jawab siswa terhadap tugas yang harus dikerjakannya. Siswa dididik untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai siswa di sekolah dengan mempelajari tentang makna demokrasi serta membuat sebuah metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan maka siswa akan memahami pentingnya demokrasi melalui pembelajaran PKn yang ditujukan untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai siswa di sekolah.

Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap penilaian sikap siswa adalah dengan melihat keaktifan siswa di kelas dan sikap tanggung jawab siswa terhadap tugas yang diberikan guru.

Tabel 4. Metode dalam Pembinaan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang

No	Temuan Penelitian
1	Kegiatan proses pembelajaran : a. Metode yang digunakan diawali dengan ceramah yang meningkatkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. b. Pada proses pembelajaran PKn disediakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
2	Metode pendidikan demokrasi melalui PKn : a. Guru mengajarkan siswa untuk bersikap demokratis dalam pembelajaran PKn dengan metode <i>Snow ball throwing</i> , debat, simulasi dan lain-lain. b. Hubungan kekeluargaan antara guru dengan siswa SMP Negeri 2 Soreang.
3	Metode pembelajaran PKn yang menghasilkan sikap tanggung jawab siswa : a. Mengerjakan tugas dengan jujur.

- | |
|---|
| b. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya.
c. Mampu pertanggung jawab atas amanat yang diterimanya. |
|---|

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan pada data tabel di atas yang diperoleh dari data observasi, dan wawancara yang dilakukan di lapangan dapat dipahami bahwa metode yang dapat digunakan dalam proses pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn untuk mewujudkan sikap tanggung jawab siswa di SMP Negeri 2 Soreang adalah sebagai berikut:

Pertama, dapat berubahnya metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dari metode ceramah yang selama ini dilakukan, berubah menjadi metode-metode yang membuat siswa aktif, kreatif dan inovatif serta menyenangkan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran PKn. Kedua, dengan terwujudnya kelas sebagai laboratorium demokrasi, siswa diajak untuk dibiasakan bagaimana menerima dan memberikan pendapat kepada teman sebaya yang akan melahirkan sikap kekeluargaan antara siswa dengan guru.

Metode pembelajaran yang menyenangkan dan bersikap demokratis ditujukan agar mengetahui hak dan kewajibannya, menumbuhkan sikap tanggung jawab siswa terhadap kewajibannya sebagai siswa di sekolah. Dengan metode pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif membuat siswa semangat untuk belajar dalam mengerjakan tugas sehingga terjalin keselarasan antara pendidikan demokrasi yang akan berdampak pada sikap tanggung jawab siswa di sekolah.

Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Proses Pendidikan Demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang

Pendidikan demokrasi untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab yang diterapkan di SMP Negeri 2 Soreang terjadi karena hasil kesepakatan antara Kepala Sekolah, Guru-guru dan tenaga kependidikan yang lain di SMP Negeri 2 Soreang dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang. Berawal ketika terjadinya kemerosotan prestasi siswa-siswi di SMP Negeri 2 Soreang, maka dengan adanya program kurikulum dan kesiapan para guru untuk mengubah pola pembelajaran

menjadi pembelajaran aktif dan kreatif serta inovatif di kelas.

Pembelajaran yang baik dimana proses pembelajaran dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah pada proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran PKn. Siswa dapat diajak untuk memahami dan menerapkan sikap demokrasi di kelas dengan selalu menerima dan memberikan pendapat dari teman sebaya serta tidak membedakan berteman, itu bukti adanya pendidikan demokrasi di dalam kelas pada proses pembelajaran dan kelas dijadikan sebagai laboratorium demokrasi.

Faktor penunjang dari pembiasaan pendidikan demokrasi di SMP negeri 2 Soreang ini adalah dengan adanya kotak kritik dan saran sebagai salah satu bentuk bebas mengemukakan pendapat, serta banyaknya slogan-slogan yang ditempel di mading yang menyuarakan tentang pentingnya demokrasi di lingkungan sekolah, selain itu sebagai perwujudan pembiasaan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang adalah dengan pemilihan OSIS secara langsung yang dilakukan sama dengan pemilihan umum dan diharuskannya siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang untuk pemilihan ekstrakurikuler yang diminati oleh siswa.

Tabel 5. Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Proses Pendidikan Demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang

No	Temuan Penelitian
1	Faktor-faktor penghambat dalam proses pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang : a. Kebiasaan malu bertanya. b. Guru kurang menggunakan metode pembelajaran
2	Faktor penunjang dalam proses pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang: a. Pemberdayaan sarana dan prasarana di SMP negeri 2 Soreang untuk menunjang pendidikan demokrasi. b. Adanya kesepakatan antara pihak sekolah dan guru untuk mengubah pola pembelajaran menjadi demokratis. c. Terjalannya kerjasama dengan sekolah lain untuk membiasakan siswa menghilangkan rasa malu. d. Diadakannya kegiatan-kegiatan yang

	diadakan di sekolah yang melibatkan siswa.
e.	Memberlakukan proses pemilihan secara langsung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan pada data tabel di atas yang diperoleh dari data observasi, dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pendidikan demokrasi untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab di SMP Negeri 2 Soreang adalah sikap malas dan malu bertanya yang telah ada sebagian besar dalam diri siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang. Sikap malas terjadi karena kebiasaan di rumah yang dibawa ke sekolah sedangkan rasa malu bertanya karena siswa tidak terbiasa dengan selalu bertanya yang baik dan benar. Pada saat pembelajaran PKn belum terwujudnya kelas sebagai laboratorium demokrasi siswa belum terbiasa dengan selalu mengemukakan pendapat yang baik dan benar kepada teman sebayanya. Selain itu faktor lain adalah kurangnya pemberdayaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mewujudkan pembinaan pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang.

Namun adanya kesepakatan untuk merubah itu semua dengan merubah sistem pembelajaran khususnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang membelajarkan pendidikan demokrasi untuk selalu dapat menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.

Selain itu, pembiasaan yang dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh setiap siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang dan harus bertanggung jawab atas keputusannya. Selain itu, yang menjadi faktor penunjang lainnya dari proses pembinaan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang adalah terlaksananya pemilihan OSIS secara langsung sebagai wujud dari pendidikan demokrasi yang nyata sehingga pendidikan demokrasi dapat berjalan dengan baik dan dapat menunjang sikap partisipasi siswa yang mempunyai sikap tanggung jawab siswa bagi siswa-siswi di SMP Negeri 2 Soreang yang dapat menjadikan sebutan dengan sekolah demokrasi.

Peran dan Upaya Pihak Sekolah serta Komite Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn

Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn bertujuan untuk membiasakan sikap demokratis siswa pada saat proses pembelajaran PKn, sesuai dengan hasil observasi lapangan bahwa kurangnya implementasi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran PKn, jika dilihat dari materi pembelajaran PKn di SMP sedang mempelajari materi tentang demokrasi namun yang dikhawatirkan materi tersebut tidak sampai kepada aplikasinya di lapangan.

Maka peran dan upaya dari pihak SMP Negeri 2 Soreang bersama-sama dengan guru memberikan pengajaran mengenai pentingnya demokrasi di lingkungan sekolah sebagai terwujudnya pendidikan demokratis di persekolahan. Peran dan upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Soreang adalah dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk bersikap demokratis melalui pemilihan ekstrakurikuler, aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah seperti perlombaan dan pertandingan baik antar pelajar maupun antar sekolah dan yang paling penting menumbuhkan sikap kekeluargaan diantara sesama siswa di SMP Negeri 2 Soreang.

Peran dan upaya yang dilakukan yang dilakukan oleh komite sekolah dalam implementasi pendidikan demokrasi dapat dilakukan dengan cara memberitahukan kepada orang tua siswa tentang proses kegiatan pembelajaran yang diajarkan di persekolahan dan ikut serta dalam kegiatan yang di lakukan di persekolahan. Adanya hubungan yang baik antara orang tua dan pihak sekolah sebagai bentuk tanggung jawab antara guru dengan orang tua siswa.

Tabel 6. Peran dan Upaya Pihak Sekolah serta Komite Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui Pembelajaran PKn

No	Temuan Penelitian
1	Peran yang dilakukan pihak sekolah dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang: a. Memotivasi kepada siswa untuk bersikap demokrasi dalam proses

	pembelajaran. b. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. c. Selalu mendengarkan kritik dan saran dari siswa. d. Mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa.
2	Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang: a. Mengadakan berbagai kegiatan untuk memacu siswa aktif di sekolah. b. Menyampaikan informasi di sekolah melalui mading.
3	Hasil dari perwujudan implementasi pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang adalah terciptanya pembinaan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan pada data tabel di atas yang diperoleh dari data observasi, dan wawancara yang dilakukan dilapangan. Dapat dipahami bahwa peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan komite sekolah dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab.

Peran yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam proses implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan pembiasaan pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh setiap guru kepada siswa, terutama pada saat mata pelajaran PKn diharapkan untuk selalu menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi dan sebagai penunjang proses pembelajaran yang aktif dan kreatif serta inovatif dan menyenangkan.

Siswa dibelajarkan dan dibiasakan untuk mempunyai hak suaranya melalui proses mengemukakan pendapat sehingga akan terjalin bentuk rasa kekeluargaan antara guru dengan siswa dan pihak sekolah.

Peran yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam proses pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang dapat dilakukan dengan cara membuat berbagai kegiatan baik antar kelas maupun antar sekolah supaya siswa-siswi dapat bersosialisasi dengan

teman yang lain dan adanya pembagian kelas yang dilakukan setiap satu tahun sekali membuat siswa mengenal siswa yang lainnya. Adanya selogan atau catatan-catatan yang terpampang di dalam kelas yang menyuarakan pentingnya rasa tanggung jawab siswa dan indahnyanya mengemukakan pendapat menjadi salah satu pemicu timbulnya kesadaran siswa dalam proses pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang.

Hasil dari perwujudan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn adalah dengan terlihatnya perubahan dari segi pembelajaran pada mata pelajaran PKn, kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi. Adanya sikap keterbukaan antara guru dengan siswa dan adanya hubungan yang baik dan rasa kekeluargaan antara guru dengan siswa di sekolah sebagai perwujudan sikap demokratis di sekolah dan rasa tanggung jawab atas perilaku yang di lakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang.

Pembahasan

Kurangnya Guru PKn Dalam Melakukan Pengemasan Materi Pelajaran PKn

Kurangnya pengemasan materi demokrasi yang dilakukan oleh guru PKn dapat mengakibatkan kurangnya keaktifan siswa di dalam kelas, ini terbukti dengan tidak terselenggaranya kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang. Selama ini proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 2 Soreang ini hanya menggunakan metode ceramah atau mencatat saja sehingga penyampaian materi kurang dipahami oleh siswa SMP Negeri 2 Soreang.

Hal ini tidak sesuai dengan pemaparan dari buku *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan* yang dikemukakan oleh Winatraputra & Sapriya (2005) bahwa substansi Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan dipilih dan diorganisasikan secara terorkestrasi (*Orchestrated*) dengan menekankan pada tumbuhkembangnya lebih lanjut tentang kesadaran, pengertian, tentang pentingnya kehidupan bermasyarakat secara tertib dan mulai tumbuhnya tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*).

Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan

warga masyarakat di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui keterlibatan sosial (*social participatory learning*) dan belajar melalui interaksi sosial kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana pendidikan demokrasi yang diterapkan di persekolahan, pendidikan demokrasi adalah salah satu hal yang sangat penting bagi siswa supaya memahami dan melaksanakan pendidikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah sehingga mengenal dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai siswa. Begitu pentingnya pendidikan demokrasi di persekolahan sehingga CISED mengadakan kerjasama dengan USIS dalam rangka *Conference on Civic Education for Civil Society*.

Secara konseptual pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis diterima sebagai dasar pertimbangan utama bagi pendidikan di Indonesia. Ikhtisar ke-pendidikan ini pada dasarnya harus ditujukan untuk mengembangkan kecerdas-an spiritual, rasional, emosional dan sosial warga negara bagi sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin atau khalifah pada hari ini dan esok.

Melalui pembelajaran PKn diharapkan menjadikan warga negara Indonesia yang baik dan cerdas yaitu mereka yang secara ajek memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli maka pembinaan demokrasi melalui mata pelajaran *civic* dan PKn dapat berhasil dengan baik dalam menghasilkan warga negara yang demokratis dengan bahan-bahan, metode mengajar yang digunakan adalah bahan metode mengajar yang demokratis. Keberhasilan tidak hanya karena bahan dan metode mengajarnya yang demokratis namun penilaian dan lingkungan serta seluruh perangkat hukum yang mendukungnya pun telah mengandung nilai-nilai demokratis.

Pembiasaan yang dilakukan dalam pendidikan demokrasi melalui mata pelajaran PKn adalah pemahaman siswa tentang pandangan yang baik mengenai pendidikan demokrasi yang dilakukan di kelas. Kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi yang mana tempat untuk belajar mendengarkan dan menerima pendapat dari teman sebaya, aktif ikut serta dalam diskusi serta mengetahui akan hak dan kewajiban siswa di sekolah.

Nilai demokrasi yang seharusnya diterapkan belum sepenuhnya dengan baik dengan kurangnya keaktifan siswa di kelas. Seharusnya guru dapat menerapkan pilar-pilar yang terkandung didalam demokrasi, seperti yang dikemukakan oleh Sanusi (1998:4-12) mengidentifikasi sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni :

- a. demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. demokrasi dengan kecerdasan;
- c. demokrasi yang berkedaulatan rakyat;
- d. demokrasi dengan “*Rule of law*”;
- e. demokrasi dengan pembagian kekuasaan Negara;
- f. demokrasi dengan hak asasi manusia;
- g. demokrasi dengan pengadilan yang merdeka;
- h. demokrasi dengan otonomi daerah;
- i. demokrasi dengan kemakmuran dan
- j. demokrasi yang Berkeadilan Sosial.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pilar-pilar demokrasi dapat diwujudkan dengan penerapan pengemasan pembinaan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang yang dilakukan menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Guru dapat senantiasa memberikan materi yang disajikan secara menarik kepada siswa sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.

Adapun pengemasan atau metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dapat dicontohkan dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual muncul karena dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil pembelajaran yang ditandai dengan ketidakmampuan sebagian besar siswa menghubungkan apa yang telah mereka dipelajari dengan cara pemanfaatan pengetahuan tersebut pada saat ini dan di kemudian hari dalam kehidupan siswa.

Guru juga harus mampu menilai kelompok belajar siswa pada usia SMP atau

masa remaja kematangan kognitif dapat dilihat dari :

- a. Menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawaban yang final ke arah membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori.
- b. Menerima kebenaran dari sumber otoritas kearah memerlukan bukti sebelum menerima.
- c. Memiliki banyak minat atau perhatian kearah memiliki sedikit minat/ perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya.
- d. Bersikap subjektif dalam menafsirkan sesuatu kearah bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika guru dapat memahami sifat siswa maka akan mempermudah proses pembelajaran di kelas dan dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi.

Maka dapat ditarik kesimpulan dalam mengubah kurangnya pengemasan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang adalah guru dengan siswa bersama-sama dapat menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi dan sama-sama dapat berperan aktif didalam proses pembelajaran. Guru harus mendorong siswa untuk belajar mandiri dan siswa juga harus dilatih untuk selalu mandiri dan selalu bertanggung jawab atas tugas yang seharusnya di kerjakan. Di lingkungan sekolah dilakukan pemantauan oleh semua pihak sekolah dengan cara ikut aktif di dalam pendidikan demokrasi dengan penyediaan kotak kritik dan saran.

Pembelajaran PKn Dapat Mengembangkan Sikap Siswa Sebagai Warga Negara Yang Bertanggung Jawab

Proses pembiasaan pendidikan demokrasi melalui Pembelajaran PKn akan melahirkan sikap siswa sebagai warga Negara yang bertanggung jawab, karena tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga Negara yang baik dan cerdas. Mereka yang secara ajek memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Pendidikan Kewarganegaraan yang aktif dan efektif dapat mengembangkan sikap siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ini terbukti dengan materi yang disampaikan, kegiatan pembelajaran yang diikuti siswa serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari segi pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan tidak terlepas dari posisi ilmu-ilmu sosial khususnya bidag-bidang disiplin ilmu politik, sosiologi dan ekonomi termasuk di dalamnya studi-studi tentang hubungan sosial, analisis terhadap proses politik dan berbagai kelembagaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Studi kemasyarakatan pada sebuah masyarakat demokratis akan menempatkan prinsip demokrasi sebagai karakteristik dari sistem sosial dan juga tentunya akan dikaji berbagai topik di antaranya tentang kondisi-kondisi yang diperlukan untuk sebuah masyarakat dan organisasi-organisasi yang demokratis serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang di dalam politik khususnya yang menyangkut perilakunya sebagai pemilih dan sumber-sumber pendukung yang menunjang nilai-nilai dan gerakan yang menghambat atau mempertahankan lembaga demokratis.

Menurut Cogan (1998) merekomendasikan bahwa

Kebijakan pendidikan di masa depan harus berdasarkan pada suatu konsepsi kewarganegaraan multi-dimensional sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan umat pada awal abad ke 21. Konsepsi ini harus menembus semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pendidikan, pemerintahan dan organisasi, serta keterkaitan antara sekolah dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pembelajaran PKn bertujuan untuk menghasilkan warga yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya.

Untuk merealisasikan arah perkembangan pendidikan demokrasi, selayaknya dilakukan analisis terhadap "*curriculum content*", buku ajar PKn dan survei terhadap konsep pemikiran para pakar dan praktisi guna menentukan pangkal tolak dan arah pengembangan program pendidikan

kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan era demokrasi dan hak asasi manusia.

PKn pada dasarnya harus ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, rasional, emosional dan sosial warga negara bagi sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/ atau khalifah pada hari ini dan esok. Karakter dari pembelajaran PKn adalah warga negara Indonesia yang baik dan cerdas yang secara ajek memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Sesuai dengan teori di atas maka di SMP Negeri 2 Soreang, PKn sebagai mata pelajaran yang mengajarkan tentang dimensi kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial dapat mengembangkan sikap siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab yang dibelajarkan adalah tanggung jawab akan kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa-siswi seperti mengerjakan tugas piket, mengerjakan tugas dengan baik, tanggung jawab akan kelas yang ditempatinya dan tanggung jawab dalam proses pembelajarannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa penerapan pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang perlu dibiasakan sehingga cita-cita SMP Negeri 2 Soreang sebagai sekolah penerapan pendidikan demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Maka, pembahasan hasil penelitian dari guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Soreang dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadikan sikap siswa-siswi SMP negeri 2 Soreang mempunyai sikap yang bertanggung jawab, semuanya dapat dilakukan apabila dibelajarkan dan dibiasakan.

Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan akan melahirkan Sikap demokratis didalam hal cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sikap demokratis di sekolah dan di kelas yaitu :

- a. Melibatkan warga sekolah dalam setiap pengambilan keputusan.
- b. Menciptakan suasana sekolah yang menerima perbedaan.
- c. Pemilihan kepengurusan OSIS secara terbuka.

- d. Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat.
- e. Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka.
- f. Mengimplementasikan model-model pembelajaran yang dialogis dan interaktif.

Sedangkan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah dan kelas adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan setiap kegiatan yang di lakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan.
- b. Melakukan tugas tanpa disuruh.
- c. Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat.
- d. Menghindari kecurangan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas piket secara teratur.
- f. Peran aktif dalam kegiatan sekolah.
- g. Mengajukan usulan pemecahan masalah.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran PKn dapat mengembangkan sikap siswa sebagai warga Negara yang bertanggung jawab dengan melihat tujuan dari lahirnya PKn yaitu menjadikan siswa yang baik dan cerdas yang secara ajek memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Melalui pembelajaran PKn yang secara ajek memelihara dan mengembang-kan cita-cita nilai demokrasi akan melahirkan sikap siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat oleh siswa SMP Negeri 2 Soreang dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang diperbuat, yang terkandung didalam mata pelajaran PKn.

Penerapan Sikap Demokratis dan Bertanggung Jawab dalam Kehidupan Sehari-hari

Sikap demokratis dan sikap tanggung jawab harus dibelajarkan dan dibiasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini terbukti dengan sikap dan perilaku siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang yang secara perlahan-lahan mulai berubah kebiasaannya menjadi lebih baik. Perubahan tersebut dikarenakan proses pembelajaran secara demokratis yang diterapkan di SMP Negeri 2 Soreang. Pihak

sekolah merasa berperan besar di dalam proses pembelajaran pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, sekolah berusaha untuk bersama-sama mengajarkan dan membiasakan pembinaan demokrasi di lingkungan sekolah dengan selalu bersikap demokratis kepada siswa, siswa diajak untuk selalu mengemukakan pendapatnya dan bersifat membuat suasana kekeluargaan antara guru dan siswa.

Untuk membelajarkan pendidikan demokrasi ada beberapa hal yang harus terpenuhi yaitu paradigma baru pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi dan HAM yang secara metodologi menuntut kebaikan dalam dimensinya, yakni : *“curriculum content and instructional strategies, civic education classroom, and learning environment”* (CICED: 1999). *Pertama*, diyakini bahwa isi kurikulum dan strategi pembelajarannya ditekankan bahwa *“...for all levels of school should be carefully selected and dynamically organized integratedly upon the bases of democratic ideals, values, norm, and moral, psychologically relevant to individual development, contextually relevant to various learning, environment and scientifically sound”* (CICED, 1999 a:6).

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa implikasi dari semua prinsip tersebut adalah bahwa kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan demokrasi seyogyanya dikembangkan secara sistemik dengan lintas jenjang, jalur, dan bidang dengan konsep dasar demokrasi komprehensif atau secara utuh bidang, dengan organisasi kurikulum yang berdiversifikasi merujuk pada *“life cycle”* anak antara perkembangan kognitif, afektif, sosial, moral dan *skill*. Serta lingkungan belajar setempat.

Dengan kata lain, kurikulum pendidikan demokrasi seyogyanya mengandung aspek ideal yang bersifat nasional, aspek instrumental yang bercorak ragam, dan aspek praktisi yang adaptif terhadap lingkungan setempat. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan demokrasi seyogyanya melibatkan para praktisi.

Adapun yang perlu dijadikan muatan nasional adalah pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia yakni cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi Indonesia yang

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan HAM, berdasarkan kedaulatan rakyat, bertujuan mencerdaskan bangsa, menerapkan prinsip pembagian kekuasaan negara, mengembangkan otonomi daerah, menegakkan “*rule of law*”, mengembangkan sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan prinsip keadilan sosial.

Kelas Pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dilihat dan diperlakukan, artinya dikembangkan sebagai “.....*laboratorium for democracy where the spirit of citizenship and humanity emanating from the ideals and values of democracy are put into actual practice by learners and teachers as well. In such a classroom learners and teacher should collaboratively develop and share democratic climate where decision making process is acquired and learned*” (CICED, 1999a:6).

Profil konseptual kelas Pendidikan Kewarganegaraan harus dikembangkan untuk menggantikan kelas PKn atau pendidikan demokrasi saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Perwujudan semangat kewarganegaraan dan kemanusiaan yakni *civic virtue* yang menjadi inti nilai demokrasi, dan perilaku interaktif guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, dan penciptaan iklim demokratis dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk itu, proses pembelajaran pendidikan demokrasi perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan yang bersifat memberdayakan siswa. Dengan demikian, kelas pendidikan demokrasi akan berubah dari yang selama ini bersifat dominatis menjadi integratif yang berorientasi kepada proses berfikir kritis dan pemecahan masalah atau *critical thinking oriented and problem solving oriented models*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sikap tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah dan kelas adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan.
- b. Melakukan tugas tanpa disuruh.
- c. Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat.

- d. Menghindari kecurangan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas piket secara teratur.
- f. Peran aktif dalam kegiatan sekolah.
- g. Mengajukan usulan pemecahan masalah.

Kebebasan yang diajarkan di SMP Negeri 2 Soreang ini adalah kebebasan mengemukakan pendapat secara kritis dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi kesamaan hak dan kewajiban sebagai siswa dan memberikan kenyamanan di dalam pembelajaran, serta bertanggung jawab di dalam mengerjakan tugas dan bertanggung jawab dalam menentukan sikap.

Dalam prakteknya para pendidik hendaknya memosisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran perlu adanya suasana yang terbuka, akrab dan saling menghargai (Budimansyah, 2003:7).

Sikap warga negara yang bertanggung jawab seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib menjadi anggota masyarakat yang independen, karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab.

Pembiasaan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab dengan pertanyaan penelitian sikap demokrasi dan tanggung jawab siswa harus dibelajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan pembiasaan selalu membiasakan kelas sebagai laboratorium demokrasi, selalu menerima dan memberikan pendapat kepada teman sebaya dan selalu membiasakan aktif dalam kegiatan sekolah sikap demokratis dan sikap tanggung jawab siswa dapat tertanam dalam diri siswa di SMP Negeri 2 Soreang dengan sendirinya. Selain itu, menjadikan siswa yang memiliki pengetahuan dan sikap yang baik di lingkungan sekolah.

Upaya Guru PKn dan Pihak Sekolah dalam Mengatasi Kendala Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang

Peran sekolah dalam implementasi pendidikan demokrasi dapat dilakukan dengan adanya mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi, selebihnya dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari dari siswa, siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang memahami demokrasi dengan melaksanakannya dengan baik, jika diterapkan di lingkungan keluarga pendidikan demokrasi dapat diterapkan dengan pembagian tugas disetiap anak sehingga pekerjaan rumah dapat terselesaikan dan adaya pembagian pekerjaan di rumah.

Upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi kendala dalam pembinaan pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Soreang adalah dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung menurut Henry B Mayo dalam bukunya "*Introduction to Democratic Theory*" merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:

- a. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*).

Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan demokrasi yang diungkapkan oleh Henry dapat diterapkan di SMP Negeri 2 Soreang dengan mengajak seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas dan berperan aktif di lingkungan sekolah. Siswa dibelajarkan untuk selalu menyelesaikan tugas yang diberikan, pada saat pemilihan ketua kelas dapat dipilih secara langsung oleh seluruh siswa dikelas dan mengakui adanya keberagaman pada setiap orang yang harus dihormati. Untuk menunjang lahirnya nilai-nilai demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang ada ciri-ciri dari sekolah demokrasi.

Peran dan upaya yang dilakukan guru PKn dalam pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab adalah dengan memberikan kebebasan ber-pendapat pada saat proses pembelajaran di kelas dan menerima

kritik atau saran dari teman yang lainnya. Sedangkan dari pihak sekolah memberikan kebebasan yang sebeb-as-besarnya kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh setiap siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang dan harus bertanggung jawab atas keputusannya serta berusaha bersama-sama untuk membentuk sekolah yang demokartis.

SIMPULAN

Pendidikan demokrasi merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan sekolah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh sikap demokratis yang memahami persamaan antara hak dan kewajiban. Dalam pendidikan demokrasi yang dilakukan lebih menggambarkan proses keaktifan siswa sebagai bentuk aktivitas siswa di sekolah. Pendidikan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dilakukan agar keaktifan siswa baik di kelas maupun di lingkungan sekolah dapat terlaksana dengan baik sehingga sekolah dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi.

Selama ini proses pembelajaran yang diajarkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diwarnai dengan kurangnya aktifitas di kelas sehingga siswa merasa jenuh dan bosan pada saat mata pelajaran PKn. Kondisi seperti ini menimbulkan keprihatinan dan hal tersebut telah terjadi pengabaian terhadap nilai-nilai mendasar dari pendidikan demokrasi.

Faktor yang sangat dirasakan kurang menunjang adanya implementasi pendidikan demokrasi adalah kurangnya aktifitas siswa di kelas sehingga tidak terbentuk kelas sebagai laboratorium demokrasi dan kurangnya keaktifan siswa di lingkungan sekolah. Pola pembelajaran, penanaman nilai demokrasi diharapkan dapat meningkatkan pembudayaan demokrasi di lingkungan sekolah.

Siswa SMP dipandang sebagai siswa yang sudah terbiasa memperoleh sifat-sifat tertentu melalui pengalaman hidupnya yang kritis. Sekolah tempat mencari ilmu yang senantiasa dapat menjadikan siswa bersikap kritis baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, siswa SMP perlu dibimbing dan diberi pembiasaan yang baik dan terarah agar mampu memahami berbagai hal tentang materi pembelajaran di sekolah khususnya materi demokrasi pada mata

pelajaran PKn. Pendidikan demokrasi yang dilakukan pada siswa selama proses pembelajaran di kelas dan di lingkungan sekolah menjadi sangat penting.

Pembinaan dengan cara pembiasaan aktivitas demokrasi pada proses belajar mengajar di sekolah guna mengoptimalkan penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Salah satu pembiasaan yang diperlukan dan penting untuk siswa di SMP Negeri 2 Soreang adalah menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.

Kelas yang dijadikan sebagai laboratorium demokrasi sangat dibutuhkan untuk menunjang perkembangan keaktifan siswa di sekolah. Konsep kelas sebagai laboratorium demokrasi dapat memberi pemahaman awal bahwa pembelajaran harus melibatkan siswa dan aktivitas demokrasi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Siswa dapat ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dapat menerapkan sikap disiplin kepada siswa. Sekolah menyiapkan kotak kritik dan saran untuk siswa, siswa dapat ikut serta secara langsung dalam memilih ketua OSIS dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati.

Implementasi pendidikan demokrasi pada siswa SMP juga dapat diterapkan pada lingkungan keluarga. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan dengan orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga di rumah. Adanya pembagian tugas tersebut merupakan salah satu contoh dari penerapan aktivitas demokrasi di lingkungan keluarga, selain itu adanya kebebasan mengemukakan pendapat melatih anggota keluarga untuk selalu menerima dan menerapkan aktivitas demokrasi di lingkungan keluarga.

Menanamkan pendidikan demokrasi kepada siswa yaitu nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan harus jelas, konsisten, adanya keteladanan dari siswa, adanya rasa kekeluargaan antara guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak sekolah, guru, siswa dan komite sekolah agar adanya pembiasaan demokrasi pada siswa, dengan demikian siswa dapat belajar secara kreatif, inovatif dan menyenangkan.

Pendidikan demokrasi bukan hanya sekedar untuk mengejar prestasi akademik semata, melainkan terutama untuk mengaktifkan siswa dan menumbuhkan sikap

tanggung jawab siswa di sekolah. Siswa yang memiliki sikap tanggung jawab dapat dikatakan sebagai siswa yang cerdas secara akademik dan tingkah laku.

Kualitas pendidikan demokrasi berkembang melalui proses pembelajaran yang terus menerus (berkelanjutan). Tanggung jawab dipengaruhi oleh faktor kesadaran siswa. Faktor yang dimaksud adalah menyadari konten dari demokrasi adalah mengetahui hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Hak siswa adalah mendapat pengajaran dari guru yang bersifat kreatif, inovatif dan menyenangkan. Sedangkan kewajiban siswa adalah belajar dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan tugas dengan rasa yang bertanggung jawab.

Meningkatnya aktivitas demokrasi yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 2 Soreang didukung dengan lingkungan yang demokratis. Ketika siswa berhasil dalam pembinaan demokrasi dan sikap siswa yang sudah terbiasa bertanggung jawab maka terciptanya pembinaan demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, I (2012). *Global Citizen*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budimansyah, D. (2012). *Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Creswell, J. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cholis, dkk. (2007). *Ilmu Kewargaegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Darmawan, C. (2009). *Memahami Demokrasi Perspektif Teoritis dan Empiris*. Bandung : Pustaka Aulia Press.
- Daryanto dan Darmiatun, S. (2013). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Fachruddin. (2005). *Educating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society Association in Indonesia*. Dissertation at University of Pittsburgh.
- Fitriyah (Vol. 5 No. 1 Juli-Desember 2012) *Jurnal Membangun Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural*. UIN Malang.
- Hakam, K. (2007). *Bunga Rampai Pendidikan Nilai*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

- Jurnal Konstitusi*. Volume 6 Nomor 2, Juli 2009. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kalidjernih, F. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung : Widya Aksara Perss.
- Kuswana, W. (2010). *Taksonomi Berfikir*. Bandung : ROSDA
- Komalasari, K. (2011). *Pembelajaran Kontekstual*. Bandung: Refika Aditama.
- Majid, A dan Andayani D. (2012). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariana, D dan Paskarina, C. (2010). *Merancang Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Bandung : APII
- Matthew Gandal and Chester E. Finn, Jr. (*Democratic Teaching*) Freedom Papero.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Narsito.
- Rahmat, dkk. (2008). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI
- Raihani. (2007). *Education reforms in Indonesia in the twenty-first century*. *International Education Journal*, 2007, 8(1), 172-183.
- Rosyada. (2014). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Tp.
- Sihono Teguh (Volume 8 No 1, April 2011). *Jurnal Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sundawa, D (2010). *Disertasi Judul Membangun kecerdasan berdemokrasi warganegara melalui perwujudan kelas sebagai laboratorium demokrasi*.
- Pidato Penganugrahan Doktor Honoris Causa Prof.H. Muhammad Nu'man Soematri,M.sc.,Ed. *Mengkokohkan Dan Memperluas Spirit Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Globalisasi*.
- Wahab, A dan Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winatraputra dan Budimansyah, D (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Winatraputra. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Winatraputra, U.S. 1999a. *Civic Education Classroom as A Laboratory for Democracy*, Bandung: CICED
- Winatraputra. (2001). *.Disertasi, PPS Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Ya'qub,H. (1988). *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah*. Bandung : Diponogoro.
- Yin,Robert,K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Yusuf, Syamsu (2007). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung : ROSDA
- _____ (2008). *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi